

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT DD) PADA MASA PANDEMI COVID 19 DI DESA KOYA KOSO KECAMATAN ABEPURA KOTA JAYAPURA PROVINSI PAPUA

Oridek Kawasa Papua Rumbewas
NPP. 29.1806

*Asdaf Kota Jayapura Provinsi Papua
Program Studi Studi Kebijakan Publik*

Email:oridekrumbewas0726@gmail.com

ABSTRACT

Problem/Background (GAP): Indonesia is one of the developing countries in the world, this is due to the lack of good human resources in people's lives, also in social and political terms, one of which is the increasing poverty rate that occurs in the country. Indonesia also during the Covid 19 pandemic, in response to this, the government created a village fund direct cash assistance program (BLT DD). **Purpose :** The purpose of this research is to find out the implementation of policies during the pandemic of the BLT DD program in Koya Koso Village, Abepura District, Jayapura City and the inhibiting factors of the BLT DD program, as well as to find out the efforts of village government officials in overcoming the inhibiting factors in the implementation of the BLT DD **Methods:** This research uses the d research method qualitative descriptive with an inductive approach, purposive sampling technique was used to determine informants in order to describe and analyze the implementation of the BLT DD program policy in Koya Koso Village. Data collection was done by means of interviews, documentation, and observation. Data analysis techniques used were data reduction, presentation data, and drawing conclusions. **Results / Findings:** Based on the observations made by the author, it can be concluded that the implementation of the BLT DD program policy in Koya Koso village has been going well, but has several obstacles, seen from the validation of the beneficiary data that is not in accordance with the poverty data, delays in the distribution of direct cash assistance from village funds, as well as coordination that needs to be improved. Suggestions that can be given are: it is necessary to validate data, transfer distribution, socialize for the community. **Conclusion:** The implementation of the BLT DD program policy in Koya Koso Village, Abepura District, Jayapura City, in the implementation of the village government, most of it has been running according to the regulations that have been regulated, but there are still some small things that make it less than optimal. This can be seen from the variables that determine the success of implementing a policy from the results of interviews with unfavorable informants. From the four indicators based on Edward III's theory, it can be concluded as follows: The communication that exists within the Koya Koso Village Government Office is still lacking in coordinating between the community and the government with each other. So that it hinders government activities in serving the community. Therefore, the indicators of transmission, clarity, and consistency have not been optimal. The resources of the government apparatus in the Koya Koso village itself are very good. Then in terms of facilities to run the current

wheels of government, facilities from other aspects in carrying out services are very adequate. The disposition of the Koya Koso Village apparatus can be considered quite good because from the author's observations there are still several parties and village government officials who have the character does not care in carrying out their duties and responsibilities. This can be seen from the realization of the BLT DD program activities whose results have not been maximized. running the village government.

Keywords: Covid 19 Pandemic, BLT DD Assistance Program, Policy Implementation.

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Indonesia merupakan salah satu negara berkembang di dunia, hal ini disebabkan masih kurangnya sumber daya manusia yang baik dalam kehidupan masyarakat, juga dalam segi sosial maupun politik, salah satunya ialah angka kemiskinan yang semakin meningkat yang terjadi pada negara Indonesia juga pada saat pandemi Covid 19 dalam menyikapinya pemerintah membuat program bantuan langsung tunai dana desa (BLT DD), salah satu sasaran dari Program BLT DD adalah Masyarakat yang kehilangan mata pencaharian, memiliki anggota keluarga yang rentan sakit menahun atau kronis pasca pandemi covid 19. **Tujuan:** Adapun tujuan daripada penelitian ini ialah untuk mengetahui implementasi kebijakan pada masa pandemi program BLT DD di Desa Koya Koso Kecamatan Abepura Kota Jayapura dan faktor penghambat program BLT DD, serta mengetahui upaya aparat pemerintah desa dalam mengatasi faktor penghambat dalam pelaksanaan Program BLT DD. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif, Teknik purposive sampling digunakan untuk menentukan informan agar dapat mendeskripsikan dan menganalisis pelaksanaan kebijakan program BLT DD di Desa Koya Koso. Pengumpulan data dikerjakan dengan cara wawancara, dokumentasi, dan observasi. Teknik analisis data yang dipakai yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. **Hasil/Temuan:** Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan oleh penulis, dapat disimpulkan Pelaksanaan kebijakan program BLT DD di desa koya koso telah berjalan dengan baik, namun memiliki beberapa hambatan dilihat dari validasi data penerima manfaat tidak sesuai dengan data kemiskinan, keterlambatan dalam penyaluran bantuan langsung tunai dana desa, serta adanya koordinasi yang perlu ditingkatkan. Saran yang dapat diberikan yaitu : perlu dilakukan validasi data, transparansi penyaluran, sosialisasi bagi masyarakat. **Kesimpulan:** Implementasi kebijakan program BLT DD Pada Desa koya koso Kecamatan abepura Kota Jayapura pada pelaksanaan Pemerintahan kampungnya sebagian besarnya sudah berjalan sesuai dengan peraturan yang sudah diatur akan tetapi masih ada beberapa hal kecil yang membuatnya kurang maksimal. Hal ini dapat dilihat dari variabel penentu keberhasilan implementasi sebuah kebijakan dari hasil wawancara bersama informan yang kurang baik. Dari keempat indikator yang berdasarkan teori Edward III dapat disimpulkan sebagai berikut: Komunikasi yang terjalin dilingkungan Kantor Pemerintahan Desa koya koso masih kurang dalam berkoordinasi antara masyarakat dan pemerintah satu sama lainnya. Sehingga menghambat kegiatan pemerintahan dalam pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu pada indikator transmisi, kejelasan, dan konsistensi belum optimal. Sumber daya aparat pemerintah di desa koya koso sendiri sudah sangat baik. Kemudian dari segi fasilitas untuk menjalankan roda pemerintahan saat ini, untuk

fasilitas dari segi lainnya dalam melaksanakan pelayanan sudah sangat memadai. Disposisi yang dimiliki oleh aparat Desa koya koso dapat dinilai cukup baik karena dari hasil pengamatan penulis masih ada beberapa pihak dan aparat pemerintah desa yang memiliki karakter tidak peduli dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab. Hal ini dapat dilihat dari realisasi kegiatan program BLT DD yang hasilnya belum maksimal. Struktur Organisasi Pemerintah Desa koya koso sudah sangat sesuai dengan yang diatur dalam Perwal Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Desa dan sudah saling berhubungan dalam menjalankan roda pemerintahan desa.

Kata Kunci: Pandemi Covid 19, Program Bantuan BLT DD, Implementasi Kebijakan.

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemiskinan di Indonesia, tahun 2017 mengalami penurunan, baik dari sisi jumlah maupun persentase, perkecualian pada September 2013, Maret 2015, Maret 2020, dan pada September 2020 mengalami kenaikan disebabkan oleh adanya pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia. Jumlah penduduk miskin di Indonesia Persentase penduduk miskin pada Maret 2021 sebesar 10,14 persen, sebesar 27,54 juta orang, dalam lingkup perkotaan naik sebesar 876,5 ribu orang, sedangkan pada lingkup perdesaan naik sebesar 249,1 ribu orang. Persentase kemiskinan di perkotaan naik dari 7,38 persen menjadi 7,88 persen. Sementara itu, di perdesaan naik dari 12,82 persen menjadi 13,20 persen. Pemerintah telah melakukan berbagai upaya dalam penanggulangan kemiskinan. Sejak krisis moneter yang terjadi pada 1998, pemerintah mengeluarkan Jaminan Pengamanan Sosial (JPS) untuk mengurangi dampak krisis terhadap berkurangnya jumlah penduduk miskin. Pemerintah juga telah meluncurkan berbagai program subsidi untuk kebutuhan pokok seperti beras untuk rakyat miskin (Raskin), dana bantuan langsung sebagai kompensasi kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), dan juga bantuan langsung seperti Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada bidang kesehatan, Bantuan Siswa Miskin (BSM) pada bidang pendidikan, Program Keluarga Harapan (PKH), dan masih banyak program-program lainnya. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT Dana Desa) adalah salah satu bantuan yang dikeluarkan pemerintah pada masa pandemi covid 19, yang bertujuan untuk membantu masyarakat miskin yang ada di desa yang terkena dampak dari covid 19, supaya dapat memenuhi kebutuhan dasarnya. Bantuan ini berasal dari dana desa yang dialokasikan untuk bantuan langsung tunai yang akan diterima oleh keluarga penerima manfaat yang memenuhi kriteria tertentu. Program BLT DD merupakan implementasi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19, Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penanggulangan COVID-19 Di Desa Melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Desa. Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa yang diantaranya terkait penyediaan Bantuan Langsung Tunai yang bersumber dari Dana Desa (BLT Dana Desa). Ada beberapa kriteria calon penerima bantuan ini, sesuai dengan Buku Panduan Pendataan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang dikeluarkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS), kriteria penerima bantuan ini adalah keluarga miskin di Desa baik yang

terdaftar di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), maupun yang tidak terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, yang memenuhi kriteria sebagai berikut :

1. Bukan sebagai penerima bantuan BPNT/PKH/pemilik Kartu Prakerja.
2. Mengalami kehilangan mata pencaharian (tidak mempunyai cadangan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasarnya tigabulan kedepan);
3. memiliki anggota keluarga yang rentan sakit menahun atau kronis.

Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa dilaksanakan pada 3 (tiga) periode yang berjalan selama 9 (sembilan) bulan, dengan besaran Rp 600.000,00 pada periode pertama dimulai bulan April-juni, dan dilanjutkan periode kedua dan ketiga dengan besaran Rp 300.000 dimulai sejak bulan juli-desember. Sesuai dengan ketentuan dalam peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No 14 tahun 2020. Kota Jayapura merupakan salah satu dari sekian banyak daerah di Indonesia yang melaksanakan BLT DD. Kota Jayapura sebagai ibu kota Provinsi Papua terdata melalui Badan Pusat Statistik Provinsi Papua pada tahun 2020 memiliki jumlah penduduk sebanyak 398 ribu jiwa yang mana angka ini menjadikan Kota Jayapura sebagai kota dengan penduduk terbanyak. Badan Pusat Statistik Provinsi Papua melalui satgas penanganan Covid-19 Kota Jayapura mencatat jumlah penduduk miskin di Kota Jayapura per September 2020 mengalami peningkatan 11,49 % yakni 45,7 ribu jiwa dari yang sebelumnya 44,4 ribu jiwa penduduk miskin atau 11,16 % . Peningkatan angka penduduk miskin tersebut dikarenakan Pandemi Covid-19. Hal itu membuat Provinsi Papua tetap bertahan pada posisi provinsi termiskin ke-5 di Indonesia setelah Papua Barat (21,7%), dan Nusa Tenggara Timur (21,21%). BLT DD sudah dijalankan Kota Jayapura yang mempunyai 5 Kecamatan dengan 14 Desa. Seluruh kecamatan di Kota Jayapura telah melaksanakan penyaluran BLT Dana Desa tahun 2020 dengan jumlah keluarga penerima manfaat sebanyak 5.009, penyaluran bantuan langsung tunai dana desa juga dilaksanakan di Kecamatan Abepura yang merupakan salah satu kecamatan yang ada di Kota Jayapura, yang terdiri dari 3 desa.

1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Desa Koya Koso merupakan Desa dengan jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) terbanyak yaitu berjumlah 250 KPM pada tahun 2020, diikuti oleh Desa Nafri berjumlah 154 KPM dan Enggros berjumlah 45 KPM. Desa Koya Koso, program ini sudah berjalan dengan baik namun tingkat prioritas penetapan peserta penerima manfaat masih belum terakomodir dengan baik. Program ini seharusnya dikhususkan kepada masyarakat miskin, tetapi kenyataannya masih ada penerima program ini yang tergolong mampu, dan masih banyak yang belum mendapat bantuan ini. Data proses validasi data yang dilakukan belum akurat. Dengan kata lain, pendataan secara sistematis perlu ditetapkan guna terwujudnya penerima manfaat yang tepat sasaran.

1.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, mengenai Pelaksanaan penggunaan dana desa maupun pelaksanaan bantuan langsung tunai dana desa (BLT DD) yaitu Penelitian Dahyar Daraba (2017) Pengaruh Program Dana Desa Terhadap Tingkat Partisipasi Masyarakat Di dalam perspektif pelayanan publik dimana penelitian ini bertujuan untuk Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Program dana desa terhadap tingkat partisipasi masyarakat di Kecamatan Galesong Utara Kabupaten

Takalar. Dimana dalam penelitian ini Menjelaskan bahwa program dana desa dilaksanakan berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa yang sudah dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa dan Anggaran Pendapatan Belanja (APB) Desa. Penelitian Refendy Paat, Sofia Pangemanan, dan Frans Singkoh, 2021 *Implementasi Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun 2020 Di Desa Tokin Baru Kecamatan Motoling Timur Kabupaten Minahasa Selatan*. Penelitian ini bertujuan Untuk mengatasi dampak COVID-19 khususnya dampak ekonomi, dengan adanya program BLT D, dapat mengurangi tingkat angka kemiskinan serta dapat Menunjukkan bahwa kebijakan penyaluran subsidi langsung tunai merupakan kebijakan pemerintah pusat secara organisatoris dan dalam tahap pelaksanaan pemerintahan tingkat desa. Penelitian Rizki Mita Utami, 2021 Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui implementasi kebijakan BLT dana desa di desa Sokawara berdasarkan model implementasi kebijakan Grindle. Menunjukkan bahwa kepentingan kelompok sasaran terpenuhi, kepentingan yang dirasakan kelompok sasaran.

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Dalam penelitian ini peneliti melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan peneliti yakni mengenai Implementasi Kebijakan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT DD) dimasa pandemi covid 19 Di Desa Koya Koso Kecamatan Abepura Kota Jayapura Provinsi Papua menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Selain itu pengukuran/indikator yang digunakan berbeda dengan penelitian sebelumnya yakni menggunakan pendapat atau teori dari George E. Edwards III dalam Agustino (2012:150) Yang dimana dengan model tersebut dapat mengukur suatu keberhasilan dari suatu kebijakan dengan tepat menggunakan variable - variable yang saling berinteraksi dan mempengaruhi implementasi kebijakan. melalui 4 dimensi yaitu (a) komunikasi, (b) sumber daya atau sumber – sumber, (c) sikap implementor (dispositions) dan (d) struktur birokrasi pelaksana.

1.5 Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis faktor penghambat serta upaya dalam meningkatkan Implementasi Kebijakan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT DD) dimasa pandemi covid 19 Di Desa Koya Koso Kecamatan Abepura Di Kota Jayapura Provinsi Papua.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif yaitu mengandalkan analisis data dengan menggunakan desain yang seragam (Creswell & Creswell, 2018) dengan menggunakan analisis data yaitu kondensasi data, penyajian data serta penarikan kesimpulan/verifikasi. Selain itu, teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui triangulasi data yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara yang mendalam dengan 15 orang informan yang terdiri dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kepala Bagian Keuangan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kepala Seksi Keuangan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Camat Abepura, Kepala Desa Koya Koso,

Sekretaris Desa Koya Koso, Kepala Badan Permusyawarahan Desa Koya Koso, Pendamping Desa Koya Koso (Masing-masing 1 orang), Keluarga Penerima Manfaat di Desa Koya Koso (sejumlah 7 informan) Peneliti melakukan observasi serta melihat dokumen yang ada. Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan dari George E. Edwards III dalam Agustino (2012:150) yang menyatakan bahwa dalam implementasi kebijakan dapat diukur melalui 4 dimensi yaitu (a) komunikasi, (b) sumber daya atau sumber – sumber, (c) sikap implementor (dispositions) dan (d) struktur birokrasi pelaksana.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Peneliti menganalisis mengenai Implementasi Kebijakan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT DD) dimasa pandemi covid 19 Di Desa Koya Koso Kecamatan Abepura Kota Jayapura Provinsi Papua dengan menggunakan Teori Implementasi Kebijakan dari George E. Edwards III dalam Agustino (2012:150) yang menyatakan bahwa dalam implementasi kebijakan dapat diukur melalui 4 dimensi yaitu yaitu (a) komunikasi yang didalamnya terdapat tiga indikator yaitu Transmisi Kejelasan, Konsistensi, (b) sumber daya atau sumber – sumber, terdapat empat indikator yaitu Staf, Wewenang, Informasi, Fasilitas (c) sikap implementor (dispositions) memiliki dua indikator ialah pengangkatan birokrat dan insentif dan (d) struktur birokrasi pelaksana juga memiliki beberapa indikator yaitu Standard Operasional Procedure (SOP) dan Fragmentasi. Dimana dalam pembahasan teori implementasi dari Edwards III ini, peneliti langsung menjelaskan beberapa atribut yang memang menurut peneliti atribut tersebut merupakan faktor penghambat dalam berjalannya implementasi Kebijakan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT DD) dimasa Pandemi Covid 19 Di Desa Koya Koso Kecamatan Abepura Kota Jayapura Provinsi Papua Adapun pembahasan dapat dilihat pada subbab berikut:

3.1 Faktor Penghambat dalam Implementasi Kebijakan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT DD) dimasa pandemi covid 19 Di Desa Koya Koso Kecamatan Abepura Kota Jayapura Provinsi Papua

3.1.1 Faktor Penghambat

Implementasi kebijakan Program bantuan langsung tunai (BLT DD) telah terselenggara dengan pelaksanaan penyaluran di Desa Koya Koso Kecamatan Abepura Kota Jayapura, Papua. Dalam penerapannya pemberian bantuan ini dilaksanakan pasca covid 19 berlangsung di Indonesia, terdapat beberapa masalah yang menjadi hambatan dalam pelaksanaannya. Dalam hal ini terdapat beberapa faktor penghambat yang menghambat kegiatan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, dalam hal ini faktor penghambat dalam pelaksanaan program BLT DD pada desa koya koso sebagai berikut adalah;

3.1.1.1 Ketidakesesuaian Data Dengan Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Dalam Penyaluran Di Desa Koya Koso

Dalam hal ini dikarenakan dalam pelaksanaan penyaluran BLT DD masih menggunakan data yang lama sehingga menyebabkan keluarga yang tergolong dalam ketentuan pemberian bantuan tidak mendapatkan bantuan telah diprogramkan, kemudian

masyarakat yang tidak tergolong dalam ketentuan pemberian yang terdata dalam penyaluran BLT DD.

3.1.1.2 Keterlambatan dalam penyaluran proses penyaluran BLT DD.

Pelaksanaan program BLT DD yang dilaksanakan di Desa Koya Koso bertujuan untuk membantu masyarakat tergolong kurang mampu,kehilangan mata pencaharian dan mengalami riwayat sakit kronis pasca menyebarnya virus covid 19,namun dalam pelaksanaan mengalami keterlambatan secara beberapa tahap sehingga ada sebagian yang sudah menerima bantuan,ada beberapa masyarakat juga yang belum menerima ini membuat proses penyaluran berjalan dengan tidak efektif mengingat sebagian dari masyarakat tidak dapat menerima bantuantersebut.

3.1.1.3 Kurangnya Pendamping dalam penyaluran pemberian BLT DD kepada masyarakat.

Dalam hal ini dikarenakan kurangnya tenaga pendamping, menyebabkan penyaluran bantuan kurang kondusif,minimnya tenaga pendamping membuat masyarakat yang tidak tergolong sebagai penerima manfaat ikut serta dalam karena mereka menilai bahwa mereka juga mendapatkan bantuan tersebut,kurangnya pendamping juga dirasakan pada saat pendataan penyaluran belum efisien dalam hal waktu.

3.1.1.4 Kurangnya koordinasi antara aparaturn pemerintah desa dan pemerintah pusat dalam penyaluran BLT DD.

Pengkoordinasian penyelenggara program BLT DD yang dilakukan antara aparaturn pemerintah desa dengan pusat masih belum terkordinasi dengan baik,dikarenakan masih banyak ketidaksesuaian arahan dalam penyaluran bantuan kepada masyarakat.

3.1.1.5 Belum adanya pemahaman masyarakat mengenai penggunaan dari pada bantuan langsung tunai (BLT DD).

Dalam pelaksanaan program BLT DD, masyarakat yang menerima bantuan belum memahami pemanfaatan daripada bantuan tersebut,masih banyak ditemukan masyarakat yang tidak menggunakan dengan baik bantuan tersebut untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

3.2 Upaya untuk meningkatkan Implementasi Kebijakan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT DD) dimasa pandemi covid 19 Di Desa Koya Koso Kecamatan Abepura Kota Jayapura Provinsi Papua

Berdasarkan Implementasi Kebijakan tentang Program BLT DD dimasa pandemi covid 19 Aparatur Pemerintahan Desa dalam proses implementasi kebijakan tersebut Aparatur Pemerintah Desa Koya Koso juga melakukan berbagai upaya agar kebijakan dapat diimplementasikan dengan sebaik mungkin sehingga dapat mencapai target dengan baik tersebut. Berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat dilihat upaya yang dilakukan oleh Aparatur Pemerintah Desa Koya Koso dalam implementasi kebijakan program BLT DD tersebut adalah sebagai berikut:

3.2.1 Aparatur Pemerintahan Desa melakukan pemabaharuan data atau validasi data Keluarga Penerima Manfaat(KPM).

Pemerintah Desa Koya Koso melakukan revisi terhadap data penerima manfaat agar tidak adanya kesalahpahaman yang terjadi antar masyarakat terkait BLT DD di Desa Koya Koso, dengan melakukan pendataan ulang di setiap wilayah RW/RT desa koya koso dengan menganalisis sesuai kategori ketentuan yang telah diberlakukan dalam pemberian BLT DD.

3.2.2 Melakukan agenda pembentukan satgas percepatan koordinasi dalam penyaluran program BLT DD pemerintahan desa dengan pemerintah pusat

Pembentukan struktur birokrasi yang lebih transparan dan lebih tepat dilakukan oleh pemerintah pusat kepada pemerintahan kota sampai kepada desa dengan membentuk satgas penyaluran program dimasa pandemic covid 19 sesuai dengan aturan yang diatur dalam kota tentang Pemerintahan Desa Pemerintahan Desa Koya Koso juga membuat Standar Operasional Prosedur kerja dan SOP dalam pelayanan. hal ini dapat menciptakan suatu situasi kondisi dalam bekerja menjadi lebih teratur serta efektif dan efisien. Menambah jumlah sarana dan prasarana untuk membantu dan mempermudah dalam pelaksanaan Program BLT Dan juga dengan adanya tambahan mengenai sarana dan prasarana maka dalam pelaksanaan program BLT DD ini akan berjalan dengan efektif dan optimal dimana dari yang awalnya menggunakan fasilitas pribadi dari pihak pelaksana, maka dengan adanya upaya penambahan ini dalam pelaksanaan program BLT DD dapat menggunakan fasilitas dari instansi yang berkaitan. Mengenai penambahan jumlah sarana dan prasarana ini juga, pihak dari BLT DD telah mengajukan ke penyelenggara yaitu pemerintahan pusat.

3.2.3 Kepala Desa mengangkat perangkat desa atau sebagai pendamping dalam proses penyaluran program BLT DD

Dalam pengangkatan pendamping dalam penyaluran bantuan harus sesuai dengan syarat yang ada didalam peraturan tentang penyaluran program BLT DD harus dapat memiliki kualitas yang baik agar dapat terjalannya proses, pendamping di masing-masing wilayah tiap desa, dan dalam penyaluran harus mengkondusifkan jalannya proses penyaluran bantuan agar tercapainya tujuan dalam pelayanan suatu program yang sedang dijalankan.

3.2.4 Meningkatkan komunikasi dalam koordinasi antara pemerintah desa koya koso dengan pemerintah pusat.

Pentingnya koordinasi antara pihak pemerintah desa dan pusat, dalam hal ini pemerintah desa koya koso melaksanakan peningkatan komunikasi antara aparatur pemerintahan sehinggasegala sesuatu dalam hal pemberian arahan baik penyaluran dana desa yang hendak diberikan kepada masyarakat terarah dan terakomodir dengan baik dan juga memanfaatkan segala waktu yang diberikan untuk pelayanan sebaik mungkin.

3.2.5 Melaksanakan sosialisasi secara berkelanjutan agar tidak terjadi kesalah pahaman masyarakat mengenai p e m a n f a a t a n program bantuan langsung tunai

Dalam hal ini sosialisasi yang dilaksanakan untuk penyelenggaraan program BLT DD telah dilaksanakan pada awal tahun pelaksanaan dengan target awal dilaksanakan melalui RW, RT atau petua desa dan disampaikan kepada masyarakat Kota jayapura, namun penyelenggaraan sosialisasi dinilai belum cukup karena masih banyaknya masyarakat yang belum mengetahui tentang sifat dana dari program BLT DD. Namun

karena adanya hal ini pihak penyelenggara dari program BLT DD ini mengupayakan pelaksanaan sosialisasi mengenai program BLT DD dilaksanakan secara berkala di tingkat RW/RT agar masyarakat lebih mengetahui mengenai dengan jelas sifat dana program BLT DD ini serta masyarakat yang telah mendapatkan informasi dapat memberi informasi kepada masyarakat lainnya yang juga mendapatkan bantuan tersebut,

3.3 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Pelaksanaan program BLT DD memberikan banyak manfaat kepada masyarakat Papua terutama kepada masyarakat pada Desa Koya Koso yang kurang mampu serta masyarakat yang kehilangan mata pencaharian dan sakit kronis pasca pandemic covid 19 yang membuat ekonomi Indonesia kurang membaik, penulis menemukan temuan penting yakni dalam pelaksanaan BLT DD ini dapat dikatakan berjalan baik dikarenakan adanya tim atau organisasi yang mengelola atau pendamping dari pada pelaksanaan penyaluran BLT DD, dimana adanya kejelasan fungsi dari organisasi, dalam pelaksanaan penyaluran bantuan ini tidak lepas dari adanya kerja sama dengan badan atau instansi lainnya dalam hal pelaksanaan penyaluran BLT pada Di Desa Koya Koso, dengan adanya kejelasan arahan mengenai penanggulangan covid-19 di desa termuat dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penanggulangan COVID-19 Di Desa Melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Desa. Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa yang diantaranya terkait penyediaan Bantuan Langsung, lalu pelaksanaan Program BLT DD ini sendiri telah berjalan cukup konsisten dalam pelaksanaan pelayanan dalam penyaluran kepada masyarakat yakni tim pendamping penyaluran serta kualitas ketersediaan personil yang cukup baik dalam pelaksanaan penyaluran BLT DD. Sama halnya dengan temuan Refendy paat, Sofia Pangeman dan Frans Singkoh, 2021 bahwa dengan adanya program BLT DD mampu mengatasi dampak dari pada pandemi covid 19 khususnya dampak ekonomi dengan adanya program BLT DD dapat mengurangi tingkat angka kemiskinan. (Rizki Mita Utami, 2022) implementasi kebijakan program BLT DD dapat dirasakan masyarakat dalam kepentingan kelompok sasaran kepada kelompok masyarakat sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan dalam program ini pelaksanaan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.

3.4 Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Penulis menemukan faktor penghambat dalam implementasi kebijakan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT DD) dimasa pandemi covid 19 Di Desa Koya Koso Kecamatan Abepura Kota Jayapura Provinsi Papua yakni ketidaksesuaian data dengan jumlah keluarga penerima manfaat (KPM) dalam penyaluran Didesa Koya Koso, Keterlambatan dalam penyaluran proses penyaluran BLT DD, Kurangnya Pendamping dalam penyaluran pemberian BLT DD kepada masyarakat, Kurangnya koordinasi antara aparat pemerintah desa dan pemerintah pusat dalam penyaluran BLT DD, serta Belum adanya pemahaman masyarakat mengenai penggunaan dari pada bantuan langsung tunai (BLT DD) dalam pelaksanaannya.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil Penelitian yang telah dilaksanakan di Desa koya koso Kecamatan

Abepura Kota Jayapura Provinsi Papua, serta analisis data, fakta, dan informasi yang terkumpul, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: Implementasi kebijakan program BLT DD Pada Desa koya koso Kecamatan abepura Kota Jayapura pada pelaksanaan Pemerintahan Desa sebagian besarnya sudah berjalan sesuai dengan peraturan yang sudah diatur akan tetapi masih ada beberapa hal kecil yang membuatnya kurang maksimal. Hal ini dapat dilihat dari variabel penentu keberhasilan implementasi sebuah kebijakan dari hasil wawancara bersama informan yang kurang baik. Dari keempat indikator yang berdasarkan teori Edward III dapat disimpulkan sebagai berikut: Komunikasi yang terjalin dilingkungan Kantor Pemerintahan Desa koya koso masih kurang dalam berkoordinasi antara masyarakat dan pemerintah satu sama lainnya. Sehingga menghambat kegiatan pemerintahan dalam pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu pada indikator transmisi, kejelasan, dan konsistensi belum optimal, Sumber daya aparatur pemerintahan didesa koya koso sendiri sudah sangat baik. Kemudian dari segi fasilitas untuk menjalankan roda pemerintahan saat ini, untuk fasilitas dari segi lainnya dalam melaksanakan pelayanan sudah sangat memadai, Disposisi yang dimiliki oleh aparatur Desa koya koso dapat dinilai cukup baik karena dari hasil pengamatan penulis masih ada beberapa pihak dan aparatur pemerintah desa yang memiliki karakter tidak peduli dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab Hal ini dapat dilihat dari realisasi kegiatan program BLT DD yang hasilnya belum maksimal serta Struktur Organisasi Pemerintah Desa koya koso sudah sangat sesuai dengan yang diatur dalam Perwal Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Desa dan sudah saling berhubungan dalam menjalankan roda pemerintahan desa.

Keterbatasan Penelitian: Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu penelitian, dimana dalam waktu yang diberikan terbilang singkat namun peneliti dapat melakukan penelitian dengan beberapa lokasi yaitu di Kantor Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Koya Koso.

Arah Masa Depan Penelitian (*Future work*):

Peneliti menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu peneliti menyarankan agar Aparatus Kantor Pemerintahan Desa Koya Koso lebih memaksimalkan mengenai jumlah ketersediaan personil dikarenakan jumlah ketersediaan personil tentunya sangat berperan penting dalam proses pelayanan ini, lalu diharapkan agar Aparatur Pemerintahan Desa dapat lebih transparansi dalam alokasi dana penyaluran BLT DD ini selanjutnya agar Aparatur Pemerintahan lebih memberikan perhatian dalam Program Penyaluran BLT DD ini dimana menambah sarana dan prasarana dalam penyaluran ini dalam pelaksanaannya serta sangat diharapkan agar Program bantuan ini diintegrasikan agar masyarakat memahami manfaat dari penerimaan bantuan.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Kantor Pemerintahan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Koya Koso Kecamatan Abepura Kota Jayapura Provinsi Papua beserta jajaran yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang telah memberikan kesempatan ini penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Dahyardaraba,2017.Pengaruh program dana desa terhadap partisipasi Masyarakat di kecamatan daelsong,utara.kab.Takalar.
- Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penanggulangan COVID-19 Di Desa Melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Desa.
- Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa yang diantaranya terkait penyediaan Bantuan Langsung Tunai yang bersumber dari Dana Desa (BLT Dana Desa)
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 Tentang Pengelolaan Dana Desa
- Refendy Paat,Sofia Pangemanan, dan Frans Singkoh,2021(1)*Implementasi Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun 2020 Di Desa Tokin Baru Kecamatan Motoling Timur Kabupaten Minahasa Selatan.*
- Rizki Mita Utami,2021(Implementasi Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT Dana Desa) Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Desa Sokawera Kecamatan Cilogok Kabupaten Banyumas.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19)

